

INTISARI

Karena kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalami krisis serta semakin majunya teknologi khususnya di bidang kesehatan mengakibatkan biaya kesehatan semakin mahal. Meninjau dari permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa program JPKM yang tercantum dalam UU No.23 / Tahun 1992. Dengan dicanangkan program tersebut penulis ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan minat masyarakat terhadap program pemerintah tersebut (JPKM) khususnya di Kelurahan Notoprajan.

Penelitian ini menggunakan teknik cuplikan kuota untuk kuesioner dan wawancara kepada aparat pemerintahan (Kepala Kelurahan, Ketua Pengurus JPKM, dan tiap Ketua RW). Sampel yang digunakan untuk kuisisioner sebanyak 120 responden dengan pembagian kuisisioner 15 eksemplar per RW.

Dari hasil wawancara dapat diperoleh informasi mengenai pelaksanaan JPKM di Kelurahan Notoprajan dimana telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun. Untuk pemberian pelayanan dilakukan oleh Puskesmas di Kelurahan Notoprajan tersebut. Sedangkan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan untuk paket kesehatan dasar belum mencakup secara keseluruhan baru memberikan pelayanan pemeriksaan, peserta dapat diperiksa di puskesmas tersebut sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Untuk iuran anggota tiap bulan ditarik sebesar Rp 500,- per anggota, selain itu aparat pemerintah kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang JPKM tersebut.

Dari 120 responden didapat 114 responden (95%) yang telah mengenal JPKM dan ada 101 responden (84,17%) yang berminat menjadi peserta JPKM, sedangkan selebihnya ada 6 responden (5%) yang tidak mengenal JPKM, dan ada 19 responden (15,83%) yang tidak berminat menjadi anggota JPKM. Untuk yang tidak berminat menjadi anggota JPKM antara lain karena telah menjadi peserta selain JPKM, lingkungan yang kurang termotivasi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang program JPKM, alasan perekonomian keluarga yang kurang, serta dikarenakan persepsi masyarakat bahwa tidak adanya atau kurangnya sarana dari pemerintah terhadap program tersebut. Akan tetapi meninjau dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang JPKM dan berminat untuk menjadi peserta JPKM.

ABSTRACT

The crisis of Indonesian economics and the more advanced technology particularly on healthcare have led to the considerable cost increase. Looking into the problem, the government issued its policy of JPKM, which included on UU No.23/1992. The author wanted to know to what extent knowledge and interest of the communities for such program (JPKM), particularly in the district of Notoprajan.

Research used the technique of picked-out quota for questionnaires and interviews to the district official (chief of the district, program manager of JPKM, and chief of neighborly organization). Samples for questionnaire are 120, and 15 questionnaire were given to each of such neighborly organization).

Interview brought information on JPKM implementation within the district of Notoprajan for as long as 1 year. Services were provided by Local Community-based Healthcare (Puskesmas). The healthcares for basics package had not yet cover entirely, only gave partially services where peoples could have themselves examined 4 times a month. Member's contribution of funds was Rp 500,- beside that local government of the district had socialized JPKM to the local community.

From 120 respondent, there were 114 (95%) knew of JPKM and 101 (84.17%) interested to join the program, and the rest of 6 (5%) did not know JPKM, and 19 (15.83%) were uninterested to join. The reason of uninterested-kind were varied from condition of joining another program, less-motivated environment, less of recognition and concern of JPKM, less economics resources, and perception that government have no sufficient equipment to perform the program. Looking into the research's result, it is clear that most people were concerned and interested joining